



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**



## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

*Jl. Soekarno-Hatta No. 7. A Telp. (0293) 789182 Fax. (0293) 788080  
Kota Mungkid 56511*

### **Tahun 2024**

## DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	19
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	31
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	35
	3.3. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
BAB V	: PENUTUP.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat Renja BPBD kabupaten Magelang tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD kabupaten Magelang, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Tahap penyusunan Renja PD Tahun 2025 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal Renja PD, penyiapan rancangan Renja PD, Forum Renja PD, dan penyusunan rancangan akhir Renja PD.

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 telah menyesuaikan dengan terbitnya Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutahiran klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Masukan dari peserta forum Renja perangkat daerah menjadi bahan dalam proses penyusunan Renja PD Tahun 2025 melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program dan kegiatan yang terpadu dalam forum Renja PD.

Renja PD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang selaras dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

## **1.2. Landasan Hukum**

Renja PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025 disusun dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 109);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 76);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 15).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Tahun 2025 BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai langkah awal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan untuk mewujudkan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Renja PD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi BPBD Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 2025.
2. Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
3. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPBD tahun 2025.
4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, program dan kegiatan penunjang prioritas bupati.

##### **4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya; dan tabel rencana program dan kegiatan.

##### **5. BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 pada BPBD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 1 urusan, dengan jumlah 2 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

1. Terdapat 2 program dengan predikat kinerja sangat tinggi, dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $\geq 91$  yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100,94% dan Program Penanggulangan Bencana dengan capaian 105,34%.
2. Terdapat 1 program dengan realisasi kinerja keuangan sangat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $91 \% \leq 100 \%$  yaitu :
  - Program Penanggulangan Bencana dengan capaian 98,25%
3. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 1 program dengan predikat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $76 \% \leq 90 \%$  yaitu :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan capaian 89,67%

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2023 masuk dalam predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan nilai **103,14 %** dari target **100 %**, sedangkan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **92,95 % (Sangat Tinggi)**.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Pelaksana kegiatan secara umum terlaksana secara keseluruhan,
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai,
3. Peran serta masyarakat dan aparatur tim pelaksana kegiatan sangat aktif
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, baik kebijakan/regulasi, anggaran, maupun sumber daya lainnya;
5. Koordinasi yang terpadu dan efisien antara pemerintah daerah dan stakeholders terkait sehingga arah kebijakan sejalan dengan kebutuhan dan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif oleh semua pihak yang terlibat;
6. Dukungan teknologi dan informasi yang memungkinkan komunikasi dan penyediaan data secara real-time;

Perkiraan capaian tahun 2023 yang terdiri dari 1 urusan dan 2 program dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya adalah lebih tinggi dikarenakan tercapainya target pelaksanaan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100 %)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (100%)
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (100%)
6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100%)
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)

10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100%)
11. Pengadaan Mebel (100%)
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)
15. Pemeliharaan Mebel (100%)
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
18. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota (100%)
19. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (100%)
20. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (100%)
21. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (100%)
22. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota(100%)
23. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (100%)
24. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota (100%)
25. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana (100%)
26. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (100%)

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (127,16%)
2. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (128,92%)

Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (88,89%)

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Ada Jabatan struktural yang kosong dikarenakan pensiun serta promosi .
2. Ada Jabatan pelaksana yang promosi menjadi pejabat struktural.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai
3. Peran serta masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan sangat aktif.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Respon cepat terhadap penanganan bencana yang baik melalui pengerahan tenaga penanganan bencana secara terkoordinir yang melampaui perencanaan karena adanya peningkatan jumlah kejadian bencana yang berpengaruh pada meningkatnya respon cepat pada kejadian bencana secara signifikan.
2. Dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana melebihi perkiraan kejadiannya, berpengaruh pada peningkatan jumlah pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana.
3. Jumlah penanganan pasca bencana melebihi target karena adanya efisiensi, sehingga kinerjanya melampaui target.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah dengan adanya beberapa program/kegiatan yang dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berakibat penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang melampaui target kinerja yang diharapkan.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2023 Kabupaten Magelang**

Nama PD : BPBD Kabupaten Magelang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kegiatan Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun (2023)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 Dokumen	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 dokumen LKPJ, LKJIP, LPPD dan Pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	4 laporan	4 laporan	100,00%	3 Laporan	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 kali	4 laporan	4 laporan	100,00%	4 Laporan	

1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	12 bulan	27 orang/bulan	24 orang/bulan	88,89%	26 Orang/bulan	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 kegiatan yang dikelola, 12 dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun dan 1 laporan keuangan yang tersusun	11 kegiatan yang dikelola, 12 dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun	11 kegiatan yang dikelola, 12 dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun	100,00%	11 Dokumen	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	N/a	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 dokumen	1 laporan	1 laporan	100,00%	5 Laporan	
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	N/a	26 dokumen	26 dokumen	100,00%	1 Dokumen	
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 Paket	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket Peralatan Rumah Tangga	100,00%	1 Paket	

1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	5 rapat koordinasi, 22 perjalanan dinas luar daerah, 58 perjalanan dinas dalam daerah, 24 kali layanan humas dan protokol	48 laporan	48 laporan	100,00%	122 Laporan		
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	5 Dokumen		
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	N/a	1 Unit	N/a	N/a	N/a	N/a		
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 unit filling cabinet, 14 buah kursi jabatan, 50 buah kursi rapat, 10 buah kursi staf, 1 buah kursi tunggu, 1 set meja tamu, 5 unit rak arsip dan 3 unit rak logistik	3 unit	3 unit	100,00%	1 Unit		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 paket	5 unit	5 unit	100,00%	1 Unit		
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3000 surat	3200 surat	4.069 surat	127,16%	12 Laporan		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 rekening jasa komunikasi, 1 rekening jasa SDA, 3 rekening jasa listrik	120 laporan	120 laporan	100,00%	12 Laporan		
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									

1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	25 unit	25 unit	100,00%	23 Unit		
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	30 unit	24 unit	24 unit	100,00%	4 Unit		
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit	80 unit	80 unit	100,00%	75 Unit		
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2046 meter, 6 gedung	5 unit	5 unit	100,00%	5 Unit		
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>									
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>									
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	N/a	N/a	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	N/a		
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	875 Orang	385 0rang	880 Orang	880 0rang	100,00%	875 Orang		
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>									
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	20 Orang	N/a	N/a	N/a	N/a	20 Orang		
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen		

1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit	60 orang	8 unit	8 unit	100,00%	1 Unit		
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15 Orang	220 orang	N/a	N/a	N/a	15 Orang		
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	30.000 orang	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	12 Dokumen		
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat bencana yang terlaksana	N/a	2 kali	26 orang	26 orang	100,00%	N/a		
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	N/a	9 sertifikat tanah, 6 lokasi vetifer, 1 dokumen JITU PASNA	N/a	N/a	N/a	N/a		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>									
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	439 kali	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2 Dokumen		
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	370 Orang	251 orang	370 orang	477 orang	128,92%	370 Orang		
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1552 Orang	288 kali Distribusi Logistik, 5 kali Dropped Air	57.550 orang	71.649 orang	124,50%	1552 Orang		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>									
1	-	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen		

1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen		
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Aplikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan	N/a	N/a	N/a	N/a	3 Laporan		
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	N/a	N/a	N/a	N/a	1 Dokumen		
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Jitupasna, Jumlah rehabilitasi sektor-sektor terdampak bencana	N/a	N/a	1 dokumen,1 kali	1 dokumen,1 kali	100,00%	N/a		

## 2.2. Analis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang lebih dari 100% yaitu **103,14%** walaupun Wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dan merupakan daerah rawan bencana yang tersebar di 21 kecamatan. Kabupaten Magelang merupakan supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Magelang kecuali bencana Tsunami.

Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Magelang baru memiliki Perda no. 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan Rincian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang telah disusun pada tahun anggaran 2023. Sedangkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang, Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Magelang dan Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana baru akan disusun tahun 2025.

Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Magelang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Magelang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB maupun dana masyarakat terutama CSR dari dunia usaha.

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2021 sebesar **103,14%** termasuk dalam kategori **sangat tinggi** sesuai tabel 2.2. Untuk target 2019-2024 sesuai dengan SPM dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)			(12)	(13)
1	Cakupan ketangguhan Daerah menghadapi bencana			62.89	65.84	100,00	100,00	100,00	62.89	80,86	127,98	103,14	100,00	
	Pelayanan informasi rawan bencana			32.17	36.96				32.17	100,00%				SPM
	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			31.45	34.41				31.45	30,00%				SPM
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi			100	100				100	113,95%				SPM
	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana			85	85				87.93	64,15%				non SPM
	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sitem Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					100,00	100,00	100,00			102,43	100,00	100,00	SPM dan Non SPM
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100,00	100,00	100,00			248,84	117,81	100,00	SPM

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah sesuai dengan motto BPBD Kabupaten Magelang yaitu *“cepat, tepat, menyentuh hati masyarakat”*.

Dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Magelang selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, 10 sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah :

1. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai.
2. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.
3. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang.
4. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.
5. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang.
6. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
7. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota memuat 3 indikator yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam penanganan bencana adalah :

1. Semua pejabat struktural maupun staf mendapatkan pengetahuan dan pelatihan tentang PB dan standar minimal personil BPBD 94 orang
2. Mekanisme pelaporan dan pendataan kebencanaan ke Provinsi dan Pusat menggunakan sistem informasi kebencanaan yang terprogram
3. Dalam penanggulangan bencana harus disediakan dana siap pakai khusus yang berada di BPBD
4. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana, Kajian risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi setiap jenis bencana
5. Seluruh Desa di Kabupaten Magelang menjadi DESTANA
6. Seluruh SDM di BPBD kompeten di bidang PB
7. Tempat pengungsian dan jalur evakuasi tersedia dan memadai
8. Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam PB
9. 10 sektor PB dapat bekerjasama pada kegiatan dalam pra, pada saat dan pasca bencana.

Dalam penanggulangan bencana saat ini tidak hanya melibatkan 3 peran yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha saja tetapi ditambahkan dengan peran perguruan tinggi dan media untuk berbagi peran dalam penanggulangan bencana (pentahelix).

Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Perlunya peningkatan kapasitas bagi aparatur, pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Penanganan bencana menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus untuk desa.
3. Mensukseskan program prioritas Bupati Magelang yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

4. Melaksanakan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rakornas BNPB tahun 2020 yaitu : a) Seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan; b) Setiap Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera menyusun Rencana Kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan; c) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif “Pentahelix” yaitu kolaborasi antar unsur Pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa; d) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana ; e) Panglima TNI dan KAPOLRI untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.
5. Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak bagi korban bencana oleh Pemerintah Kabupaten Magelang
6. Belum optimalnya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Magelang. Tingginya tingkat kejadian dan kerentanan bencana kurang sebanding dengan kapasitas bencana masyarakat atau lembaga pemerintah. Masyarakat kurang responsif dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Maka upaya preventif yang dilakukan pemerintah juga belum memenuhi standar universal, seperti kurangnya jalur evakuasi untuk masyarakat dan penyandang disabilitas di bangunan-bangunan penting.
7. Penanggulangan kebakaran di Kabupaten Magelang belum optimal, terutama dalam penanganan kebakaran. Waktu tanggap (*response time*) pemadam kebakaran belum optimal karena minimnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran.
8. Bencana kekeringan, krisis air, banjir, dan perubahan iklim (el nino) berpengaruh pada tingginya angka kehilangan produksi di Kabupaten Magelang.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perlu dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan dan standarisasi

indeks harga yang di gunakan. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan target kinerja kegiatan dan besarnya anggaran.

Program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dalam hal besaran anggarannya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan yang tidal dapat dianggarkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah usulan dalam Rencana Awal RKPD tahun 2025 adalah Rp.4.396.511.550,- (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan hasil dari Forum SKPD Tahun 2024 untuk penyusunan Rencana Kerja 2025 anggaran yang di usulkan sebesar Rp.6.953.150.775,- (Enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) lebih besar daripada usulan Rancangan Awal RKPD 2025. Perbedaan disebabkan adanya program dan kegiatan yang sama namun besarnya berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025  
Kabupaten Magelang

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.396.511.550	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.692.075.286
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	3.890.798.350	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.254.437.437
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	6.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	6.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.500.000

		Kinerja SKPD						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>11 Kegiatan</b>	<b>3.576.744.350</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dikelola</b>	<b>11 Kegiatan</b>	<b>4.248.959.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.565.844.350	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.207.411.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.548.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah aset yang dikelola</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>1.680.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah aset yang dikelola</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>1.680.000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1.680.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1.680.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>993.750</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1.500.000</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	993.750	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.500.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>21.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>89.580.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.080.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	-

		Disediakan				Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	80.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan</b>	<b>2 paket</b>	<b>26.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah paket pengadaan</b>	<b>2 paket</b>	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan</b>	<b>4 jenis</b>	<b>78.630.250</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan</b>	<b>4 jenis</b>	<b>80.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.630.250	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis</b>	<b>178.750.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>4 jenis</b>	<b>826.218.437</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	539.236.264
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.750.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	74.736.100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	212.246.073
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistik Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>505.713.200</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistik Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.437.637.849</b>
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>214.136.000</b>
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	875 Orang	6.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	860 Orang	214.136.000
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>72.177.000</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>784.544.000</b>
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	5.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	35 orang	15.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	26 orang	49.005.000
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	202.000.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	20 Orang	4.677.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	20 Orang	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	102.000.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	110.000.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit	1.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15 kawasan	3.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	11 Kawasan	101.514.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	13.500.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	220.025.000
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>396.145.000</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.270.850.000</b>
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	65.665.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	205.994.000

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	370 Orang	160.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	301 Orang	460.456.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1552 Orang	170.480.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1708Orang	604.400.000
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>31.391.200</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100 persen</b>	<b>168.107.849</b>
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	2.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	10.382.100
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	5.391.200	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan	3.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan	11.766.758
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	26 orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	27 orang	8.224.532
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	1.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 kegiatan	132.029.116

	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	1.000.000	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	5.705.343

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat**

BPBD Kabupaten Magelang menerima usulan dari 2 (dua) kecamatan hasil musrenbang Kecamatan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Usulan berasal dari Desa Madukoro Kecamatan Kaliangkrik yang mengajukan permintaan mobil siaga bencana dan Desa Kembanglimus Kecamatan Borobudur menyampaikan usulan mengajukan Permintaan Pembangunan Pos OPRB. Usulan oleh desa terkait tidak dapat dipenuhi dalam Renja BPBD Tahun 2025 karena diluar kewenangan BPBD.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara nasional, Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu:

1. memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana,
2. melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan
3. melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
2. Masih perlunya untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk

- kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB;
2. Mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang mengedepankan mitigasi, *preparedness, response, dan recovery*.
  3. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
  4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
  5. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
  6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten/kota); dan
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Kementerian Dalam Negeri memiliki sejumlah peluang yang dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya dalam meningkatkan kapasitas urusan pemerintahan dalam negeri yang sejalan dengan tujuan nasional.

Program Bina Administrasi Kewilayahan Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara, serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum Perlindungan Masyarakat yang mencakup pencegahan dan penganggulangan bencana serta bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program ini dijabarkan ke dalam Kegiatan, yaitu: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 2 Tahun 2012 menetapkan Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana sebagai pedoman bagi instansi pemerintah, khususnya di tingkat daerah, dalam melakukan pengkajian risiko bencana. Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk memberikan arahan dan standar dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan risiko bencana yang dapat terjadi di suatu wilayah.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi salah satu tolok ukur daerah untuk menilai keefektifan penanggulangan bencana. Pada penilaian IRBI sangat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memahami kerentanan dan potensi dampak bencana di suatu wilayah, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk geografi, kepadatan penduduk, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi. Adapun tujuan dan Sasaran mengenai IRBI yaitu :

1. **Meningkatkan Pemahaman:** Membangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana di masyarakat dan pemerintah daerah.
2. **Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data:** Memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan mitigasi bencana.
3. **Integrasi dalam Rencana Pembangunan:** Mengintegrasikan hasil pengkajian risiko bencana ke dalam rencana pembangunan dan kebijakan daerah

Selanjutnya Tahapan Pengkajian Risiko Bencana. Pedoman ini menguraikan tahapan yang harus dilakukan dalam pengkajian risiko bencana, antara lain:

1. **Identifikasi Bahaya:** Mengidentifikasi jenis-jenis bahaya bencana yang mungkin terjadi di suatu daerah, seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain.
2. **Penilaian Kerentanan:** Mengkaji kerentanan elemen yang terpengaruh oleh bencana, termasuk populasi, infrastruktur, dan lingkungan. Ini melibatkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi ketahanan masyarakat terhadap bencana.
3. **Analisis Risiko:** Menghitung dan menganalisis kemungkinan terjadinya bencana serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini meliputi pengukuran potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari setiap jenis bencana.
4. **Pemetaan Risiko:** Menyusun peta risiko bencana yang menggambarkan daerah-daerah yang berisiko tinggi dan rendah, sehingga memudahkan dalam perencanaan mitigasi.
5. **Pelaporan dan Penyebarluasan Informasi:** Mengkomunikasikan hasil pengkajian kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar semua pihak dapat memahami risiko yang ada dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah telah mampu membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Meski demikian masih terdapat dua masalah pokok yang harus terus ditangani yaitu :

- a. Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- b. Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Renja PD tahun 2025 adalah Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, sedangkan sasaran Renja PD adalah Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana. Hal tersebut sesuai dengan sasaran target kinerja Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026.

## 1.3. Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Bupati

Program kegiatan penunjang prioritas bupati langsung diambil melalui visi misi central aatau terpusat, mengingat Kabupaten magelang di pimpin oleh Penjabat Bupati yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden melalui kementerian Dalam Negeri. Adapun visi misi Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu :

1. pendapatan per kapita setara negara maju,
2. kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan,
3. Meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional,
4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia,
5. menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mengacu pada RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2025 yang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama dua tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan nasional. Program dan kegiatan pada BPBD masuk dalam tujuan kedua yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan dengan sasaran berkurangnya risiko bencana daerah.

Program unggulan BPBD Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana difokuskan pada penguatan sistem kelembagaan penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota serta Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana. Fokus prioritas ini diampu oleh BPBD melalui program Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun Renja tahun 2025 sebagaimana pada tabel 3.1 sebagai berikut :

tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp			
Berkurangnya risiko Bencana												
Meningkatkan mitigasi bencana												
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
				Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	109.568.200,00	100 persen	114.568.200,00	100 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	396.145.000,00	100 persen	396.145.000,00	100 persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									

				Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	100 Persen	21.000.000,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
				Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	72.177.000,00	100 Persen	62.177.000,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen	396.145.000,00	100 Persen	396.145.000,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
				Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	31.391.200,00	100 Persen	31.391.200,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
<b>Berkurangnya risiko Bencana</b>												
<b>Meningkatkan mitigasi bencana</b>												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	307.554.000,00	100 Persen	302.554.000,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.583.244.350,00	100 Persen	3.483.343.671,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.500.000,00	100 Persen	6.500.000,00	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Jumlah kegiatan yang dikelola	11 Kegiatan	11 Kegiatan	3.576.744.350,00	11 Kegiatan	3.476.843.671,00	11 Kegiatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
				Jumlah aset yang dikelola	8 Dokumen	5 Dokumen	1.680.000,00	5 Dokumen	1.680.000,00	5 Dokumen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26 Dokumen	1 Dokumen	993.750,00	1 Dokumen	993.750,00	1 Dokumen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

				Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 jenis	7 jenis	21.500.000,00	7 jenis	21.500.000,00	7 jenis	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Jumlah paket pengadaan	2 Paket	2 Paket	26.000.000,00	2 Paket	26.000.000,00	2 Paket	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	4 Jenis	4 Jenis	78.630.250,00	4 Jenis	78.630.250,00	4 Jenis	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	178.750.000,00	4 Jenis	173.750.000,00	4 Jenis	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mengacu pada RPD 2025-2026 dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat, dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana.

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya untuk tahun 2025 sesuai dengan RPD 2025-2026 adalah sebesar Rp.6.953.150.775,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan 2 program dan 11 kegiatan, sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Magelang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Magelang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	8	9	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					6.953.150.775,00			4.296.610.871,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.873.150.775,00			4.217.980.621,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.873.150.775,00			4.217.980.621,00		
1,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah</i>	100 persen	100 persen	5.029.982.314,00		100 persen	3.707.267.421,00		

1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah</i>	100 Persen	100 persen	6.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	100 Persen	6.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	2 Dokumen	2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	4 Laporan	2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	4 Laporan	1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dikelola</i>	11 Kegiatan	11 Kegiatan	4.208.011.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	11 Kegiatan	3.476.843.671,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	26 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.165.361.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	26 Orang/bulan	3.465.943.671,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	11 Dokumen	12 Dokumen	42.650.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	11 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Laporan	900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah aset yang dikelola</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	1.680.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	5 Dokumen	1.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	5 Laporan	5 Laporan	1.680.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	5 Laporan	1.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	993.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	993.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan</i>	7 jenis	7 jenis	44.580.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	7 jenis	21.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Paket	2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.080.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Paket	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	122 Laporan	30 Laporan	35.000.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	122 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	5 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah paket pengadaan</i>	2 Paket	2 Paket	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	2 Paket	26.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Unit	1 Unit	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	Unit	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Unit	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Unit	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	1 Unit	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		<i>jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4 Jenis	4 jenis	767.711.314,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	4 Jenis	173.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	23 Unit	23 Unit	539.236.264,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	23 Unit	65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	4 Unit	0 Unit	0,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	4 Unit	1.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	75 Unit	75 Unit	74.736.100,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang	75 Unit	17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		5 Unit	153.738.950,00	Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b><i>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i></b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.843.168.461,00</b>		<b>100 persen</b>	<b>510.713.200,00</b>	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana</i>	100 Persen	100 persen	170.256.902,00	Masyarakat dalam Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>	875 Orang	660 Orang	170.256.902,00	Masyarakat dalam Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	875 Orang	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		<i>Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	100 Persen	100 persen	345.025.000,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen	62.177.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	1 Unit	0 Unit	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Unit	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									

			<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	20 Orang	20 Orang	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20 Orang	4.677.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
			<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Kawasan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	35 Orang	0 Orang	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	35 Orang	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana									
			<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>		0 Dokumen	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	12 laporan	12 laporan	235.025.000,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 laporan	13.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									

			<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	15 Kawasan	0 Kawasan	0,00	Masyarakat dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15 Kawasan	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		<i>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	100 Persen	100 persen	1.285.850.000,00	Masyarakat Dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	396.145.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	205.994.000,00	Masyarakat Dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Dokumen	65.665.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	370 Orang	301 Orang	467.956.000,00	Masyarakat Dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	370 Orang	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	1552 Orang	1708 Orang	611.900.000,00	Masyarakat Dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1552 Orang	170.480.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		<i>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	100 Persen	100 persen	42.036.559,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	31.391.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	25.382.100,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan									

			<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	5.391.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	3 Laporan	0 Laporan	0,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3 Laporan	3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi</i>	26 Orang	0 Orang	0,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	26 Orang	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.949.116,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota									

			<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	2 Dokumen	5.705.343,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Perangkat daerah dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>80.000.000,00</b>			<b>78.630.250,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>				<b>80.000.000,00</b>			<b>78.630.250,00</b>	
1,	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	-	<b>80.000.000,00</b>		-	<b>78.630.250,00</b>	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Jenis	-	80.000.000,00	-	4 Jenis	78.630.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	-	12 Laporan	3.630.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	-	12 Laporan	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	<b>J U M L A H</b>					<b>6.953.150.775,00</b>			<b>4.296.610.871,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan tahapan perencanaan program lima tahunan dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dimaksud disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan Renja PD 2025 menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pada saat pelaksanaannya mengacu KUA PPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan upaya guna meningkatkan kinerja PD agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasarnya pada tahun 2025.

Kota Mungkid, Agustus 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,



EDI WASONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680609 199303 1 004